

Pengangguran Di Provinsi Sumatera Selatan : Pengaruh Tingkat Upah dan Inflasi

Bambang Bemby Soebyakto
Abdul Bashir

Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Abstract

The purpose of this research is to know about the influence of wage and inflation to unemployment in Province of South Sumatera. Analysis methods which used for this research are Panel Estimated and Fixed Effect. The result from this research shows that wage has positively impacted to the level unemployment, according to the estimation result it shows that increasing of wage by 1 percent will increase the level of unemployment by 5,40 percents, while inflation has a negative impact to unemployment, and the estimation shows that if inflation increase by 1 percent then the level of unemployment falls to 3,84 percents. According to estimation declared that the rate of wage has a positive impact to unemployment. Otherwise, inflation has negative impact to unemployment. Even though wage and inflation do not have a significant influence to the level of unemployment in Province of South Sumatera instead.

Keywords : wage, inflation, and unemployment

JEL : E24, E31, J64,

I. PENDAHULUAN

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat rumit di dalam pembangunan ekonomi, sehingga memerlukan penanganan khusus. Keadaan yang tidak seimbang antara kemampuan negara berkembang untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang selalu bertambah dari waktu ke waktu menimbulkan implikasi semakin tingginya angka pengangguran (Nurlina, 2014:1). Akibat terjadinya pengangguran atas kegiatan ekonomi menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kesejahteraan. Sejalan dengan itu pengangguran juga dapat menyebabkan penerimaan pemerintah menurun, serta berdampak juga terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Faktor penyebab terjadinya pengangguran didorong juga oleh kurangnya lapangan pekerjaan. Sejalan dengan itu pertumbuhan penduduk yang semakin besar dengan kecepatan yang sangat tinggi dan ternyata tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding oleh pertumbuhan investasi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tambunan, 2009). Sejalan dengan itu, jika dilihat dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (dengan asumsi ceteris paribus), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi yang rendah dengan meningkatnya kemiskinan (Tambunan, 2009).

Faktor urbanisasi menjadi salah satu penyebab tingkat pengangguran meningkat. Pada kenyataannya urbanisasi dalam skala besar akan menyebabkan pertambahan jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja semakin tinggi. Sejalan dengan itu, setiap penduduk yang melakukan urbanisasi akan memperebutkan sejumlah lapangan kerja. Sehingga jika tidak terserap maka akan memunculkan pengangguran terbuka. Sebaliknya jika terserap akan memunculkan masalah upah yang relatif kecil. Hal ini akan menyebabkan terjadinya setengah pengangguran (Nurlina, 2014: 1). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Selatan pada tahun 2012 mencapai 5,70 persen, mengalami penurunan 0,07 persen dibandingkan TPT pada Agustus 2011. Dari sisi gender, TPT laki-laki pada tahun 2012 sebesar 4,87 persen dan meningkat ditahun 2013 sebesar 5,17 persen, lebih rendah dibandingkan TPT perempuan yang mencapai 4.28 persen di tahun 2013. Namun, jika dibandingkan Jika dibandingkan dengan persen TPT di daerah perkotaan pada 2013 sebesar 3.21 persen, jauh lebih rendah dibandingkan TPT daerah pedesaan yang hanya sebesar 8.07 persen.

Menurut Dinarno, John dan Mark. P. Moore (1999) menunjukkan adanya hubungan positif antara inflasi melalui GDP deflator dengan pengangguran yang terjadi di Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Disamping itu, Tingginya tingkat pengangguran terbuka di kota selain karena pengaruh pertumbuhan alamiah penduduk, juga dipengaruhi oleh arus masuk angkatan kerja dari daerah pedesaan juga banyaknya pencari kerja pertama kali sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendidikan penduduk di perkotaan. Sementara itu kesempatan kerja pada sektor produktif di perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung para pencari kerja, maka berakibat pada tingginya tingkat pengangguran. Sejalan dengan itu, perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Selatan mulai terkendali dan membaiknya perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya permintaan atas faktor produksi dan membaiknya harga komoditas mampu membuat tingkat inflasi terkendali di angka 6,70 persen di tahun 2012 menurun dari tahun 2011 dan 2010 sebesar 8,58 dan 8,73 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi riil dapat menggambarkan peningkatan produksi secara makro atau pada sisi penggunaan

Secara ekonomi Sumatera Selatan diuntungkan karena memiliki sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, pemanfaatan SDA yang optimal tersebut secara langsung akan meningkatkan produksi masyarakat. Pada tahun 2013, perekonomian Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan 5,98 persen, melambat dibanding pertumbuhan tahun 2012 yang mencapai 6,01 persen. Perlambatan pertumbuhan ini merupakan imbas dari gejolak perekonomian dunia yang masih mengalami kontraksi akibat krisis utang. Pertumbuhan positif tetap bisa dipertahankan meskipun terjadi kelesuan ekonomi akibat dorongan pertumbuhan yang cukup signifikan pada konsumsi sebesar 8,29 persen. Konsumsi rumah tangga tumbuh dari 6,97 persen pada tahun 2012 menjadi 8,95 persen pada tahun 2013. Pertumbuhan ini ditunjang oleh pertumbuhan konsumsi makanan dan non makanan yang masing-masing mencapai 10,63 persen dan 5,11 persen, lebih tinggi dibanding pada tahun 2012 yang tumbuh 7,87 persen dan 4,99 persen.

Meningkatnya komponen permintaan agregat, sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan suatu barang meningkat secara terus-menerus, maka akan meningkatkan harga. Sedangkan untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah barang input salah satunya

tenaga kerja, dengan begitu produsen akan meningkatkan produksi. Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja dengan begitu pengangguran akan berkurang. Akan tetapi di satu sisi produsen harus menerima resiko akan menghadapi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa yang di produksi. Fenomena ini akan berdampak terjadi depresi, yang mana kegiatan produksi terhenti akibat adanya inflasi yang tinggi dan pada saat yang sama terjadi pengangguran yang tinggi pula.

Sejalan dengan itu, masalah mendasar dalam ketenagakerjaan salah satunya adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena, penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran, yaitu pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*). Berdasarkan uraian di atas kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah dan inflasi terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan.

II. STUDI PUSTAKA

2.1. Konsep Upah

Pada pasar tenaga kerja dikenal konsep tingkat upah umum. Pada kenyataannya, hanya sedikit pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Dalam menganalisis pendapatan tenaga kerja, perlu mengetahui upah riil yang menggambarkan daya beli dari jam kerja, atau upah nominal dibagi oleh biaya hidup. Tingkat upah umum ini yang kemudian diadopsi menjadi tingkat upah minimum yang biasanya ditentukan oleh pemegang kebijakan (pemerintah). Standar upah buruh harus ada batasan minimumnya. Negara berkembang tidak boleh seenaknya menentukan upah buruh serendah mungkin. Menurut Boediono (2003:15) menyatakan bahwa Perwujudan penghasilan yang layak dilakukan pemerintah melalui penetapan upah minimum atas dasar kebutuhan hidup layak. Sementara itu menurut Case dan Fair (2002: 533), yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah paling rendah yang diizinkan untuk dibayar oleh produsen kepada para pekerjanya. Lebih lanjut, Mankiw (2000) menyatakan bahwa upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan.

Menurut Gilarso (2003) menyatakan bahwa upah merupakan balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja manusia. Dalam arti luas upah yang didalamnya juga termasuk honorarium, uang lembur, tunjangan, dan lain-lain). Upah biasanya dibedakan menjadi dua seperti upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan atau buruh). Di Indonesia banyak orang berusaha sendiri dan tidak memperhitungkan upah untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam analisis ekonomi, besar kecilnya balas karya manusia sebagai tenaga kerja seharusnya ikut diperhitungkan. Tingkat upah disebut juga taraf balas karya rata-rata yang berlaku umum dalam masyarakat untuk segala macam pekerjaan. Tingkat upah ini dapat diperhitungkan per jam, hari, minggu, bulan atau tahun (Gilarso, 2003).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat upah merupakan pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah atau gaji. Lebih lanjut Badan Pusat Statistik

(2008) menyatakan selain gaji tau upah yang diterima termasuk juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin atau reguler seperti tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang. akan tetapi tidak termasuk tunjangan hari raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kuartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural.

2.2. Konsep Inflasi

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004: 293) menyatakan bahwa Inflasi terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, harga beras, bahan bakar, harga mobil naik, tingkat upah, harga tanah, dan semua barang-barang modal naik. Sejalan dengan itu Boediono (1997: 161) menyatakan bahwa inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan secara terus-menerus. Selain itu Nopirin (2000: 25) juga menyatakan bahwa inflasi merupakan Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus selama periode tertentu.

Teori A.W. Phillips (Amir, 2007: 8) menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengannya naiknya harga-harga (inflasi) maka, pengangguran berkurang.

Secara umum, faktor-faktor penyebab inflasi didasarkan pada tiga jenis inflasi yaitu (1) inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation); (2) inflasi desakan biaya (cost push inflation); (3) inflasi karena pengaruh impor (imported inflation). Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) atau inflasi dari sisi permintaan (demand side inflation) adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat (full employment and full capacity).

Berdasarkan uraian pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian inflasi merupakan proses kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus disebabkan oleh turunnya nilai uang pada suatu periode tertentu. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Konsep inflasi artinya terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.

2.3. Konsep Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan

tersebut (Sukirno, 1994). Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part-time* selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin.

Ehrenberg (2003) menyatakan jenis pengangguran menurut teori Klasik terdiri dari pengangguran struktural, friksional dan seasonal sedangkan menurut Keynesian adalah pengangguran siklikal. Keempat jenis pengangguran ini akan memunculkan pengangguran terbuka (sedang mencari kerja) dan setengah pengangguran. Lebih lanjut dikemukakan juga oleh Hauser (1974) Setengah pengangguran terdiri dari kategori berikut: (a) *working poor* yaitu orang-orang yang bekerja *full time*, sepanjang tahun, tapi mempunyai penghasilan 125% dibawah garis kemiskinan, (b) pekerja paruh waktu termasuk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu karena tidak mendapatkan pekerjaan *full time*, (c) pengangguran adalah orang yang saat ini tidak bekerja dan aktif mencari kerja, dan (d) *discouraged worker* (sub-unemployment) adalah orang yang ingin bekerja namun belum mencari kerja karena mereka merasa tidak akan memperoleh pekerjaan dengan berbagai alasan.

Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Kadangkala ada juga pekerja diperkotaan yang tidak bekerja dan secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Kelompok tersebut menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh perhari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit.

2.4. Penelitian Terdahulu

Nurlina (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa fenomena setengah pengangguran di kota mencerminkan pendapatan dan produktivitas yang rendah. Penyebab produktivitas rendah, antara lain kurangnya ketrampilan, biasanya orang kurang trampil dalam pekerjaan karena pendidikannya rendah. Pendidikan yang diperoleh di sekolah kadang-kadang terlalu umum sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung dalam pekerjaan. Akibatnya orang berpendidikan agak tinggi masih memiliki produktivitas rendah, maka kebijakan berupa pemberian pelatihan kerja dan kewirausahaan, bantuan pinjaman atau kemudahan akses mendapat pinjaman dapat meningkatkan pemberdayaan diri (self empowerment). Ditambah dengan mengendalikan jumlah kelahiran (TFR) rendah yang sejalan dengan perspektif angkatan kerja, hal ini mengimplikasikan pengangguran dapat dikurangi. Jadi, penyediaan berbagai jenis pekerjaan, tetapi menawarkan upah di bawah upah pasar (UMR) atau fokus pada sektor yang keliru akan menjadi tidak efektif mengurangi pengangguran.

Menurut Dinarno, John dan Mark. P. Moore (1999) menunjukkan adanya hubungan positif antara inflasi melalui GDP deflator dengan pengangguran yang terjadi

di Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Disamping itu, Tingginya tingkat pengangguran terbuka di kota selain karena pengaruh pertumbuhan alamiah penduduk, juga dipengaruhi oleh arus masuk angkatan kerja dari daerah pedesaan juga banyaknya pencari kerja pertama kali sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendidikan penduduk di perkotaan. Sementara itu kesempatan kerja sektor-sektor produktif di perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung para pencari kerja, maka berakibat pada tingginya tingkat pengangguran.

Amir (2007) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata antara inflasi dan pengangguran di Indonesia periode 1980-2005. Hal tersebut disebabkan karena penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Sejalan dengan itu, suatu pembuktian juga bahwa penggambaran kurva Phillip yang menghubungkan inflasi dengan tingkat pengangguran untuk kasus Indonesia tidak tepat untuk digunakan sebagai kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran.

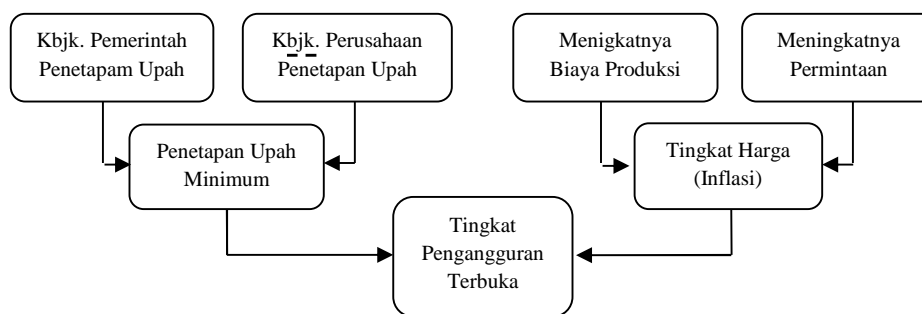
Kauffman dan Hotchkiss (1999) menyatakan bahwa penetapan upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya pengangguran yang ada. Semakin besar upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Menurut J.R. Hicks teori penetapan upah dalam suatu pasar bebas sebenarnya merupakan kasus khusus dan teori nilai umum, karena upah adalah harga tenaga kerja (Kauffman dan Hotchkiss, 1999).

Gilarso (2003) menyatakan bahwa upah atau balas karya tenaga kerja ada dua segi yang penting, untuk pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang mesti ditekan serendah mungkin. Di sisi lain, untuk pihak pekerja, upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya, dan dengan demikian juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya upah atau gaji langsung menyangkut pribadi manusia, harga diri, dan statusnya dalam masyarakat, serta merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat sebagai keseluruhan.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi di Sumatera Selatan mengakibatkan meningkatnya angkatan kerja. Sejalan dengan itu permintaan terhadap tenaga kerja di Sumatera Selatan masih sangat sedikit, sehingga angkatan kerja tersebut tidak akan terserap sepenuhnya dan akibatnya pengangguran akan meningkat. Lebih lanjut ketertarikan pada migran saat ini bukan ingin mencari kehidupan yang lebih baik, karena itu tujuan para migrant saat bukan lagi ke desa melainkan ke kota-kota besar seperti Palembang yang menjadi ibukota Provinsi Sumatera Selatan.

Perkembangan inflasi yang terus meningkat akan berdampak positif bahkan negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari turunya tingkat investasi, akibatnya tingkat pengangguran naik seiring kesempatan kerja yang rendah. Di samping itu, inflasi juga dapat memberikan berdampak positif sebagai akibat dari cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan naik, maka harga akan naik. Meningkatnya harga untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sejalan dengan itu, besaran upah akan berdampak positif bahkan negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari upah yang diterima tenaga kerja rendah, sehingga seseorang bersedia untuk menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan upah yang lebih tinggi. Di samping itu kebijakan penetapan upah yang terlalu tinggi akan menyebabkan tingkat pengangguran yang bertambah. Hal ini dikarenakan para investor akan mengambil kebijakan efisiensi biaya produksi dengan mengurangi tenaga kerja. Besaran yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran yang dilakukan adalah dengan besaran upah rata-rata upah minimum provinsi dalam satu tahun.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Variabel

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *pooled data* yaitu data *cross section* pada seluruh kabupaten/kota yang tidak mengalami perubahan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan dan *time series* tahun 2009-2013. Satuan atau besaran data yang digunakan adalah dalam bentuk persen. Data upah dilihat besaran peningkatan upah setiap tahunnya, inflasi memiliki satuan persen, dan pengangguran dilihat berdasarkan peningkatan dalam persen pertahunnya. Hal ini diharapkan dapat memudahkan karena data yang digunakan lebih seragam dalam satuan.

3.2. Teknik Estimasi

Penelitian ini menggunakan tahapan membangun model ekonometrika dengan cara model panel data yang akan dijelaskan dalam bentuk persamaan. Untuk mengetahui pengaruh upah dan inflasi terhadap pengangguran digunakan teknik ekonometrika dalam melakukan estimasi yaitu dengan *Panel Estimated Generalized Least Square* (EGLS) yaitu *Fixed Effect* (FE). Dalam hal ini asumsi yang dipakai yakni kemungkinan terjadinya perbedaan lintas *cross section* dan bukan lintas periode, ini merupakan komponen *error* satu arah bisa saja bersifat *fixed*. Jenis kesalahan bisa juga termasuk dalam klasifikasi ini, sehingga dalam penelitian ini tetap digunakan *pooled estimation* dengan melakukan *panel estimated*. Adapun model *panel estimated* sebagai berikut

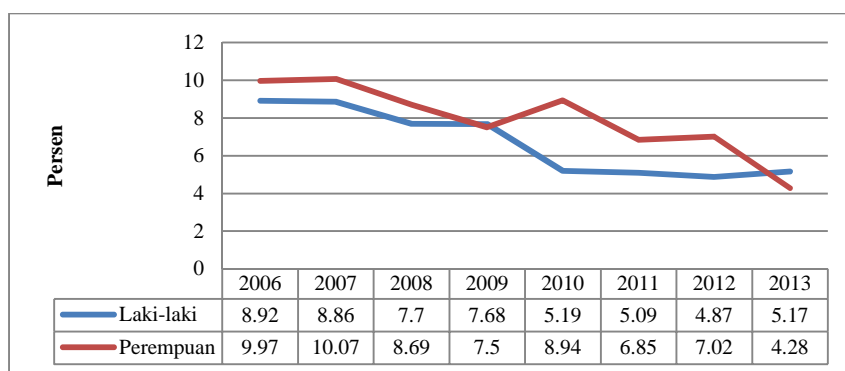
$$Unemploy_{i,t} = \gamma_0 + \gamma_1 Wage_{i,t} + \gamma_2 Inf_{i,t} + \sim_{i,t}$$

Pada model tersebut menunjukkan *unemploy* merupakan variabel dependen yakni pengangguran, *wage* dan *inflation* merupakan variabel independen yang merupakan upah dan inflasi. Sedangkan simbol *i,t* merupakan data *cross section* yang menggambarkan wilayah dan data *times series* yang menggambarkan waktu.

Kemudian simbol $\beta_{0,1,2}$ menggambarkan koefisien parameter dari variabel, dan simbol μ merupakan faktor pengganggu dari model.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

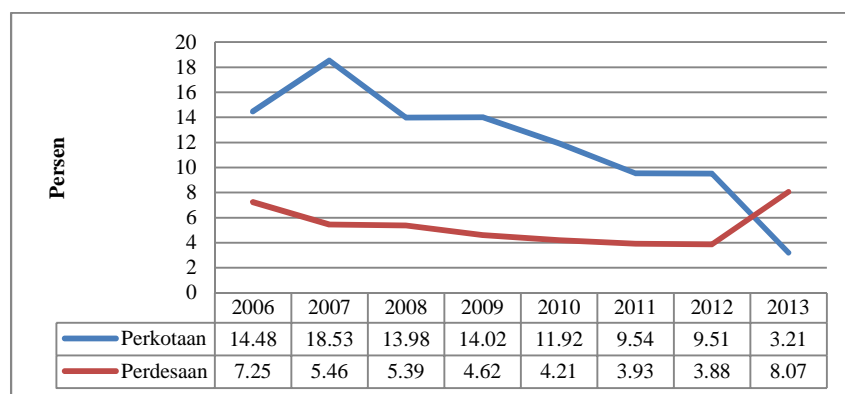
Perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Selatan pada tahun 2012 mencapai 5,70 persen, mengalami penurunan 0,07 persen dibandingkan TPT pada Agustus 2011. Dari sisi gender, TPT laki-laki pada tahun 2012 sebesar 4,87 persen dan meningkat ditahun 2013 sebesar 5,17 persen, lebih rendah dibandingkan TPT perempuan yang mencapai 4.28 persen di tahun 2013. Namun, jika dibandingkan TPT di daerah perkotaan pada 2013 sebesar 3.21 persen, jauh lebih rendah dibandingkan TPT daerah pedesaan yang hanya sebesar 8.07 persen.



Sumber: Sakernas 2006-2013, data diolah

Gambar 2
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (%) 2006-2013

Saat ini Sumatera Selatan mengalami permasalahan pengangguran yang cukup serius, hal ini sejalan dengan data yang dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini. Perkembangan rata-rata dari tahun 2006-2013 tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan, dengan rata-rata TPT perkotaan 11.90 persen, sedangkan rata-rata TPT di pedesaan sebesar 5,35 persen. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di kota selain karena pengaruh pertumbuhan alamiah penduduk, juga dipengaruhi oleh arus masuk angkatan kerja dari daerah pedesaan juga banyaknya pencari kerja pertama kali sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendidikan penduduk di perkotaan.



Sumber: Sakernas 2006-2013, data diolah

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen) 2006-2013

Sementara itu kesempatan kerja sektor-sektor produktif di perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung para pencari kerja, maka berakibat pada tingginya tingkat pengangguran. Berbeda dengan daerah pedesaan yang pada umumnya tingkat pendidikan penduduknya relatif masih rendah sehingga angkatan kerja yang ada tidak mempunyai banyak tuntutan terhadap jenis pekerjaan yang diinginkan dan mau menerima pekerjaan-pekerjaan di sektor tradisional.

Sebagaimana telah dikemukakan Nurlina (2014) pada studi empirisnya bahwa faktor penyebab pengangguran di kota selalu diarahkan sebagai akibat urbanisasi desa-kota yang didorong oleh kurangnya lapangan kerja di desa. Pertumbuhan konsentrasi penduduk di kota-kota besar terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan ternyata tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding oleh pertumbuhan industrialisasi. Fenomena ini disebut sebagai urbanisasi berlebih (*over urbanization*), yang menggambarkan bahwa tingkat urbanisasi yang terjadi terlalu tinggi melebihi tingkat industrialisasi yang dicapai oleh evolusi suatu masyarakat.

Pengujian dengan metode regresi dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel hasil estimasi berikut ini :

Model 1: Fixed-effects, using 75 observations
 Included 15 cross-sectional units
 Time-series length = 5
 Dependent variable: unemploy

Model	Coefficient	Std. Error	t-ratio	p-value	
const	5.93217	1.46899	4.0383	0.0016	***
wage	0.05401	0.20072	0.2691	0.7882	
inf	-0.03849	0.17269	-0.2229	0.8439	

P-value (F) : 0.042890**

R-squared : 0.340355

Sumber : data diolah dengan Program Gretl *Panel Estimated*

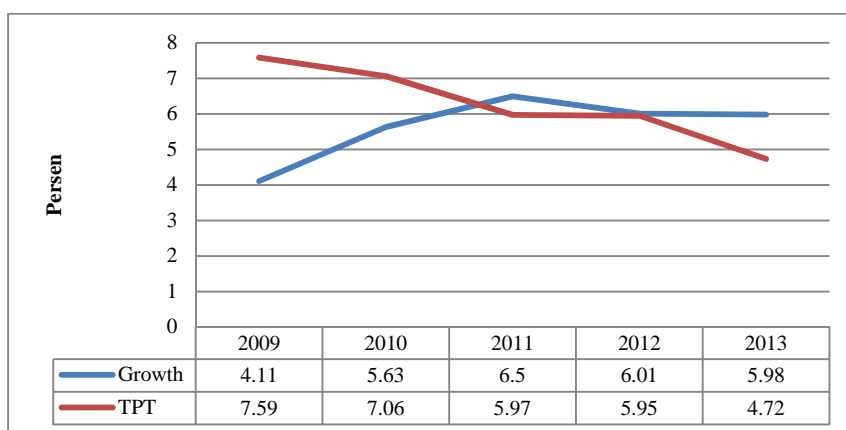
Tingkat signifikansi = 1 %, 5%, dan 10% ditunjukkan dengan ***, **, dan *

$$\text{Unemploy} = 5,932 + 0,054\text{Wage} - 0,0384\text{Inf}$$

Berdasarkan hasil estimasi di atas dapat dilihat persamaan model regresi bahwa secara statistik upah dan inflasi mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari nilai f hitung sebesar 0.0428 lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$. Namun, jika dilihat dari berdasarkan pengujian parsial tidak terdapat pengaruh yang nyata antara upah terhadap tingkat pengangguran, secara statistik nilai koefisien sebesar 0,054, hal ini berarti bahwa jika upah mengalami kenaikan sebesar 1 persen, maka pengangguran akan meningkat sebesar 5,40 persen dengan asumsi faktor lain bersifat konstan. Fenomena ini untuk kasus di daerah sangat berbeda dengan pendapat Phillip menemukan kenyataan bahwa perubahan tingkat upah akan berbanding terbalik dengan perubahan tingkat pengangguran. Menurut Phillip semakin tinggi upah maka pengangguran menjadi semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah upah, maka pengangguran juga semakin bertambah. Namun, berdasarkan pengujian statistik kasus di daerah justru terbalik, ketika pemerintah daerah menetapkan kebijakan meningkatkan tingkat upah yang cukup tinggi justru akan berdampak pada kenaikan biaya produksi produsen, pada akhirnya akan berdampak pula pada kebijakan produsen yang akan mengurangi tenaga kerjanya.

Selain itu, faktor penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara, karena itu setiap perekonomian di suatu negara pasti menghadapi masalah pengangguran, hal ini sering disebut pengangguran alamiah (natural rate of unemployment).

Berdasarkan pengujian statistik bahwa inflasi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat pengangguran. Namun, dari hasil estimasi nilai koefisien yang didapat sebesar -0,0384 yang berarti bahwa jika inflasi meningkat sebesar 1 persen, maka pengangguran akan berkurang sebesar 3,84 persen dengan asumsi faktor lain tidak berubah. Sebagaimana pendapat Phillip menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik, maka tingkat harga akan naik. Adanya peningkatan harga yang dilakukan produsen, maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen akan meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja, dengan asumsi bahwa tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output. Menurut Amir (2007) untuk kasus di Indonesia tingkat pengangguran lebih tepat dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi, dari data dibawah ini terlihat bahwa tingkat pengangguran menunjukkan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi pada periode 2011-2013, namun ada periode yang cukup ekstrim pada 2008-2010, hal ini menyimpulkan bahwa Indonesia masih dalam tahap pemulihan akibat krisis ekonomi Amerika Serikat akibat dari anjloknya permintaan pasar di Amerika Serikat.



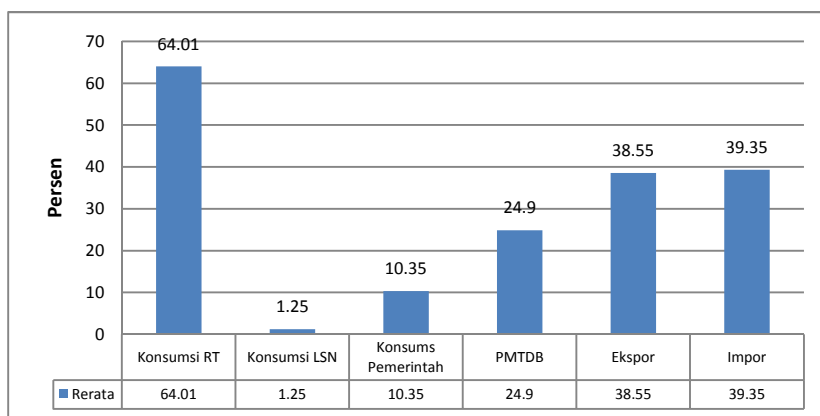
Sumber: Sakernas 2009-2013, data diolah

Gambar 4.
Pertumbuhan Ekonomi dan TPT di Prov. Sumatera Selatan 2009-2013

Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan meningkatnya harga-harga (inflasi), menyebabkan pengangguran berkurang. Menggunakan pendekatan Phillip dengan menghubungkan antara pengangguran dengan tingkat inflasi untuk kasus di daerah kurang tepat. Hal ini didasarkan pada hasil analisis tingkat pengangguran dan inflasi di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2009-2013, ternyata

secara statistik tidak memberikan pengaruh yang nyata antara inflasi terhadap tingkat pengangguran.

Hubungan inflasi dan pengangguran yang negatif seperti hasil kajian ini menunjukkan bahwa fenomena inflasi lebih cenderung merupakan fenomena *demand pull inflation* atau inflasi tarikan permintaan. Inflasi dari sisi permintaan (*demand side inflation*) merupakan inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat (*full employment and full capacity*). Dengan demikian, penggambaran kurva Phillip yang menghubungkan inflasi dengan tingkat pengangguran untuk kasus di daerah Sumatera Selatan kurang tepat digunakan sebagai kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran.



Sumber: Sakernas 2009-2013, data diolah

Gambar 5

Rata-rata Struktur Komponen Permintaan Agregat (Persen) 2009-2013

Sebagai gambaran seperti grafik di atas menunjukkan bahwa struktur komponen permintaan agregat masih didominasi oleh rata-rata konsumsi rumah tangga pada periode 2009-2013 yang cukup besar yakni 64,01 persen. Sebagai penjabar berdasarkan *demand theory*, jika konsumsi masyarakat di suatu Negara meningkat, maka produsen akan meningkatkan pasokan untuk memenuhi permintaan tersebut, dan untuk itu, produsen akan meningkatkan jumlah tenaga kerja, sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan, dan pengangguran berkurang. Dengan demikian harga barang dan jasa akan meningkat (inflasi).

Artinya untuk kasus di Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka pendek, inflasi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat pengangguran. Sejalan dengan itu, pada penelitian Amir (2007) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang nyata antara inflasi terhadap tingkat pengangguran. Menurutnya justru untuk kasus di Indonesia akan lebih tepat menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran, dan dari hasil penelitiannya terdapat pengaruh yang nyata antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen, maka tingkat pengangguran akan meurun sekitar 4,6 persen.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil dan pembahasan antara lain : (1) bahwa dalam jangka pendek perubahan tingkat upah tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap perubahan tingkat pengangguran, dan mempunyai hubungan positif, dari sisi pemerintah, kebijakan pemerintah penetapan upah minimum yang terus meningkat setiap tahun dengan rata-rata yang cukup tinggi pada periode 2009-2015 sebesar 16,74 persen, namun dari sisi serikat pekerja, melakukan desakan untuk meminta kenaikan upah minimum akibat kebutuhan dan harga-harga semakin meningkat. Sedangkan dari sisi produsen, melakukan efisiensi biaya produksi sehingga salah satu jalan yang tempuh adalah pengurangan tenaga kerja; (2) bahwa perubahan tingkat harga (Inflasi) juga tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan tingkat pengangguran dan mempunyai hubungan negatif. Fenomena ini dapat saja terjadi, dengan asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat, sehingga sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik, maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen akan menambah tenaga kerja agar kapasitas produksinya meningkat. Sehingga para produsen akan meningkatkan harga barang atau jasa, dengan asumsi bahwa tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output.

Untuk mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan, maka mobilitas ekonomi atau pembangunan ekonomi seharusnya diarahkan menuju wilayah yang mempunyai pengangguran yang tinggi, atau daerah dengan perekonomian yang rendah. Dalam hal ini, pemerintah selayaknya mendorong investasi di daerah dengan perekonomian yang rendah dan berorientasi peningkatan pada padat karya. Sektor sekunder dan tersier harus lebih dipacu produktivitasnya. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan dan manjalin kerjasama tiga pihak antara pemerintah daerah, serikat pekerja, dan perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya, sangat relevan menggunakan periode yang cukup panjang, sehingga hasil pengujian akan dapat terlihat dengan jelas. Dalam mendefinisikan tingkat pengangguran sebaiknya dibedakan antara tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran sehingga hasilnya lebih akurat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri. 2007. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia. Orasi Ilmiah Guru Besar FE Universitas Jambi. Jambi.
- Arsyad, Lincoln. 1997. Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga. Penerbit BP STIE YKPN. Yogyakarta.
- Boediono. 2003. Ekonomi Moneter, Edisi Ketiga. Penerbit BPFE UGM. Yogyakarta.
- Boediono. 1997. Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Edisi Kedua. Penerbit BPFE UGM. Yogyakarta.
- Case and Fair. 2008 . Prinsip-Prinsip Ekonomi, Edisi Kedelapan, Jilid Dua, Jakarta: Erlangga.
- Dinarno, John And Moore, P. Mark. 1999. Perfective Philips Kurve. Journal Vol. 1, No1.
- Ehrenberg, Ronald G and Robert S. Smith. 2003. Modern Labor Economis: Theory and Public Policy. International Edition. Addison Wesley. Boston.
- Hauser, Philip. 1974. The Measurement of Labour Utilization. Malayan Economic Review. Vol. 1 (April): 1-25.
- Gilarso, Drs.T. S. 2003. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Edisi Revisi. Penerbit Kanisius (Anggota IKPI). Yogyakarta.

- Kauffman, Bruce E., Julie L. Hotchkiss. 1999. *The Economic of Labor Markets*. Fifth Edition, USA: The Dryden Press, Harcourt College Publiser.
- Mankiw, N. Gregory, 2003, "Teori Makroekonomi", Terjemahan, Imam Nurmawan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Nurlina T. 2014. Pengangguran di Kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Kebijakan Mengatasinya. *Prosiding Call for Papers Seminar Nasional & Silatnas IV FORDEBI*. Dalam rangka Dies Unsri ke 54. Penerbit Unsri Press.
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter Buku 2*. Penerbit BPFE. Yogyakarta
- Samuelson A, Paul dan Nordhaus D, Wiliam. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Penerbit PT.Media Global Edukasi. Jakarta.
- Tambunan, Tulus H. 2009. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.